

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Perda tersebut, dinyatakan bahwa :

- 1) Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana adalah unsur staf Setdaprovsu yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekdaprovsu melalui Asisten Kesejahteraan Sosial.
- 2) Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian urusan pemerintahan dan atau kewenangan otonomi provinsi dibidang Pengarusutamaan Gender, Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, Keluarga Sejahtera dan Berencana.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a) Menyiapkan dan mengkoordinasikan menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian Pengarusutamaan Gender, Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak serta Keluarga Sejahtera dan Berencana.
 - b) Menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang Pengarusutamaan Gender, Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak serta Keluarga Sejahtera dan Berencana

Dalam Rencana Strategik Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan visi dan misi antara lain sebagai berikut :

1. Visi : Terwujudnya Kesetaraan Gender, Perlindungan perempuan dan Anak serta peningkatan Kesejahteraan Keluarga bagi aparat dan publik.
2. Misi :
 - 2.1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (capacity building)
 - 2.2. Membangun jaringan kerja di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (networking building)
 - 2.3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (public awareness).

Tujuan :

1. Meningkatnya kemampuan lembaga pemerintahan dan non pemerintah dalam, Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana melalui strategi Pengarusutamaan Gender
2. Meningkatnya potensi diri sumber daya aparat tentang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana.
3. Meningkatnya sistem informasi komunikasi dan edukasi kepada masyarakat serta membangun sinergitas kerja kepada lembaga masyarakat.

Sasaran :

Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana tahun 2013 s/d 2018, diarahkan untuk upaya-upaya :

1. Pengembangan aparatur dan kelompok-kelompok masyarakat yang sadar gender dan peduli terhadap hak-hak anak.
2. Peningkatan kondisi dan posisi perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi/ pekerjaan dan pengambilan keputusan.
3. Penyelenggaraan Advokasi perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu.
4. Penegakan supremasi hukum untuk Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga
5. Penguatan dan pembinaan terhadap lembaga/organisasi sosial peduli Perempuan, Anak dan Keluarga.

6. Pengembangan dan peningkatan kerjasama nasional dan regional dibidang kesetaraan dan keadilan gender dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga.

Berdasarkan fungsi/jabatan terdiri atas 1 (satu) kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, 4 (empat) Kepala Bagian, dan 8 (delapan) Kepala Sub Bagian yaitu :

- 4) Organisasi Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - a) Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana yang terdiri dari 4 bagian dan 8 sub bagian
 - b) Bagian Pengarusutamaan Gender, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha
 2. Sub Bagian Fasilitasi Gender
 - c) Bagian Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perlindungan Perempuan
 2. Sub Bagian Kualitas Hidup Perempuan
 - d) Bagian Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perlindungan Anak
 2. Sub Bagian Kesejahteraan Anak
 - e) Bagian Keluarga Sejahtera dan Berencana, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 2. Sub Bagian Fasilitasi Keluarga Berencana

Komposisi Sumber Daya Manusia tersebut berdasarkan strata jabatan, golongan dan pendidikan yaitu :

Berdasarkan golongan terdiri dari :

1. Golongan IV	:	sebanyak	8	orang
2. Golongan III	:	sebanyak	21	orang
3. <u>Golongan II</u>	:	<u>sebanyak</u>	<u>4</u>	<u>orang</u>
Jumlah	:		33	orang

Berdasarkan pendidikan terdiri dari :

- S-2	:	sebanyak	8	orang
- S-1	:	sebanyak	19	orang
- DIII	:	sebanyak	1	orang
- SLTA	:	sebanyak	5	orang
J u m l a h	:		33	orang

Kendala dan Permasalahan

1. Kurangnya dukungan SKPD dalam mengintegrasikan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) ke dalam RKA-SKPD.
2. Tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disebabkan berbagai faktor sehingga kasus ini sulit terselesaikan secara tuntas, ditambah lagi data yang ada masih berupa fenomena gunung es, sehingga dibutuhkan penanganan dari berbagai pihak.
3. Belum adanya data terpilah dimasing-masing sektor sehingga kurang mendukung profil/statistik Gender di Provinsi dan Kab/Kota dikarenakan sulitnya mengkoordinasikan permintaan data ke SKPD / Instansi lintas sektor.
4. Belum optimalnya tugas Pokja PUG Provinsi dan Focal Point SKPD dalam melaksanakan PUG.
5. Belum optimal kelembagaan Pengarusutamaan Gender yang ada sehingga masih dibutuhkan penguatan kelembagaan PUG melalui Pokja PUG Provinsi dan Kab/Kota.
6. Percepatan Kab/Kota Layak Anak sangat strategis untuk dikembangkan mengingat masih minimnya sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten/Kota dalam mendukung pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bagi anak sesuai dengan program PNBAI (Program Nasional Bagi Anak Indonesia)
7. Lemahnya koordinasi antar stakeholders dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah No. 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja sekretaris daerah dan sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/941/KPTS/2014, tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, Selanjutnya Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu menetapkan Rencana Strategis Biro melalui Keputusan Kepala Biro No. 188.4/19/PPAKB/2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Setdaprovsu Tahun 2013-2018 yang menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2016.

Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Sekeretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 2013-2018 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprovsu yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2016 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2016.

1. Visi dan Misi

Dalam Rencana Strategi Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan visi dan misi antara lain sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Kesetaraan Gender, Perlindungan perempuan dan Anak serta peningkatan Kesejahteraan Keluarga bagi aparat dan publik.

- Misi :
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (capacity building)
 - Membangun jaringan kerja di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (networking building)
 - Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (public awareness).

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

1. Meningkatnya kemampuan lembaga pemerintahan dan non pemerintah dalam, Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana melalui strategi Pengarusutamaan Gender
2. Meningkatnya potensi diri sumber daya aparat tentang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana.
3. Meningkatnya sistem informasi komunikasi dan edukasi kepada masyarakat serta membangun sinergitas kerja kepada lembaga masyarakat.

Sasaran :

Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana tahun 2013 s/d 2018, diarahkan untuk upaya-upaya :

1. Pengembangan aparatur dan kelompok-kelompok masyarakat yang sadar gender dan peduli terhadap hak-hak anak.
2. Peningkatan kondisi dan posisi perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi/ pekerjaan dan pengambilan keputusan.
3. Penyelenggaraan Advokasi perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu.
4. Penegakan supremasi hukum untuk Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga
5. Penguatan dan pembinaan terhadap lembaga/organisasi sosial peduli Perempuan, Anak dan Keluarga.
6. Pengembangan dan peningkatan kerjasama nasional dan regional dibidang kesetaraan dan keadilan gender dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga.

Berdasarkan kebijakan yang dirumuskan dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara, maka rencana program Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan Administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
7. Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
8. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penarusutamaan Hak Anak (PUHA)
9. Program Penguatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Berencana

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dalam upaya mencapai Rencana Strategis Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu ditetapkan Perjanjian Kinerja yang setiap tahunnya di tandatangani oleh Kepala Biro dan Gubernur Sumatera Utara dengan indikator kinerja yang harus dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ada pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu pada Tahun Anggaran 2016 yaitu :

- I. Meningkatnya Kualitas Hidup, peran dan kedudukan perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan meningkatnya upaya perlindungan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan indikator kinerja yaitu :
 1. Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
 2. Jumlah korban terfasilitasi layanan pengaduan dan perlindungan sementara atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di fasilitasi.

3. Jumlah kerjasama/ kemitraan di bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan tingkat provinsi dan kab/kota.
4. Jumlah kerjasama dengan TP.PKK dalam rangka pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi desa/kelurahan percontohan KDRT.

Target kinerja yaitu :

- a. Melakukan 1 (satu) Kebijakan/ darf Pergubsu tentang peningkatan kualitas hidup perempuan, dan 1 (satu) MoU tentang penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO.
- b. Melakukan fasilitasi terhadap 70 korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak baik kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun tindak pidana perdagangan orang melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan membuat 1 (satu) Tim Pendamping korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c. Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan 1 (satu) Kab/Kota dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan serta Advokasi pembentukan 3 (tiga) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten/Kota sebagai sarana/tempat fasilitasi bagi korban kekerasan perempuan dan anak serta korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- d. Melakukan Perjanjian kerjasama dengan T.PKK dalam rangka pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi desa/kelurahan percontohan KDRT dan menetapkan 10 (sepuluh) Kab/Kota sebagai pemenang Desa/Kelurahan Percontohan KDRT.

II. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak. melalui indikator kinerja yaitu :

1. Jumlah Dokumen/Kebijakan Daerah dibidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak tingkat Provinsi dan Kab/Kota
2. Jumlah Kerjasama/Kemitraan dibidang Perlindungan Anak di Provinsi dan Kab/Kota.

Target kinerja yaitu :

- a. Penyusunan 1 (satu) Peraturan Gubernur, 1 (dua) Mou yang berkaitan dengan Perlindungan Anak dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera yang menganut prinsip-prinsip non-diskriminasi dan pembentukan 1 (satu) forum anak Provinsi sebagai wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak untuk menyalurkan aspirasi anak, serta wadah pembelajaran dan pengembangan serta pengetahuan dan teknologi komunikasi. Interaksi anak menciptakan kader-kader perubahan serta motivator berfikir kritis, peka terhadap fenomena sosial, meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah. Sekaligus wadah partisipasi anak dalam pembangunan.
- b. Membentuk 1 (satu) Tim Gugus Tugas Perlindungan Anak dalam rangka peningkatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak sebagai upaya Perlindungan terhadap Anak.

III. Menkuatnya sistem dan mekanisme kelambagaan dan jaringan PUG & PUHA partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta ketersediaan profil gender & Anak di Provinsi Sumatera Utara Melalui indikator yaitu :

1. Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang penguatan kelembagaan PUG dan PUHA.
2. Jumlah penghargaan/Anugerah Parahita Ekapraya yg diperoleh di Provinsi Sumatera Utara melalui evaluasi pelaksanaan PUG tingkat Provinsi

Target kinerja yaitu :

- a. Menyusun 1 Program Kerja Pokja PUG sebagai pedoman/arah kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan khususnya Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Advokasi Pembentukan Sekretariat PPRG di 9 Kabupaten/Kota sebagai upaya percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagaimana Surat Edaran Bersama 4 (empat) Menteri yaitu : Menteri Bappenas

No. 270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan No. SE-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/4379A/SJ, dan Menteri PPPA No. SE-46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

- b. Memberikan penghargaan Kepada 6 Kab/Kota melalui Evaluasi Pelaksanaan PUG tingkat Kab/Kota sebagai apresiasi Pemerintah Provinsi atas komitmen pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara terhadap pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

IV. Meningkatnya kualitas kelembagaan, kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi, pencegahan HIV/AIDS, bahaya penanggulangan NAPZA, pengembangan dan fasilitasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kegiatan promosi, fasilitasi, advokasi, workshop, KIE bagi pemangku kepentingan, dunia usaha/swasta dan masyarakat, dengan indikator kinerja yaitu :

1. Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang dibentuk, dan Kelompok UPPKS yang mengikuti Hari Keluarga Nasional.
2. Jumlah kerjasama/kemitraan dibidang kualitas kelembagaan kelangsungan hidup Ibu, Anak dan Bayi serta pencegahan HIV/AIDS dan bahaya penanggulangan NAPZA di Provinsi dan Kab/Kota.

Target kinerja yaitu :

- a. Advokasi pembentukan 1 (satu) Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Kab/Kota yang bertujuan meningkatkan pemahaman, kemampuan dalam upaya pengembangan dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan ketahanan keluarga dan Melakukan Fasilitasi kepada 2 (dua) kelompok UPPKS Kab/Kota untuk mengikuti pameran dalam rangka Hari Keluarga Nasional dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS).
- b. Melakukan advokasi pembentukan 3 (tiga) Kelompok Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kab/Kota yang bertujuan untuk mendukung kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Balita serta menurunkan angka kematian Ibu dan angka kematian Bayi sebagaimana dalam SDGs serta Melakukan Sosialisasi 2 (dua) Kab/Kota tentang bahaya HIV/AIDS dan NAPZA di Provinsi dan Kab/Kota.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu diawali dengan adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berpedoman kepada Renstra dan RPJMD Tahun 2013-2018 yang selanjutnya dituangkan dalam Renja Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu kemudian ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK).

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2016, maka Capaian Kinerja Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu dengan sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas hidup, Peran dan Kedudukan Perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan meningkatnya upaya perlindungan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi ditingkat Provinsi dan Kab/Kota.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis adalah:

1. Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
2. Jumlah korban terfasilitasi layanan pengaduan dan perlindungan sementara atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di fasilitasi .
3. Jumlah kerjasama/ kemitraan di bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan tingkat provinsi dan kab/kota
4. Jumlah kerjasama dengan TP.PKK dalam rangka pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi desa/kelurahan percontohan KDRT

Melalui Program / Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan capaian kinerja yaitu :

Target kinerja yaitu :

1. Penyusunan 1 kebijakan (Penyusunan Draf Pergubsu tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan TPPO). Melalui kegiatan Penyusunan/pengembangan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta melakukan 1 (satu) MoU tentang penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO dengan Provinsi. Dengan capaian kinerja 100 % dan realisasi anggaran sebesar 98,50%
2. Melakukan fasilitasi terhadap 70 korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak baik kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun tindak pidana perdagangan orang melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Melalui kegiatan Pengembangan sarana perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia (trafiking), pornografi dan pornoaksi di tingkat Kab/Kota dengan Capaian Kinerja 100 % dan realisasi Anggaran sebesar 67,83%.
3. Melakukan 1 (satu) Perjanjian Kerjasama dengan Kab/Kota dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan realisasi kinerja 1 (satu) Perjanjian Kerjasama dengan Kab/Kota. serta Advokasi pembentukan 3 (tiga) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten/Kota sebagai sarana/tempat fasilitasi bagi korban kekerasan perempuan dan anak serta korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Melalui kegiatan Kerjasama/kemitraan dengan lintas sektor, lembaga/organisasi perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan. dengan Capaian Kinerja 100 % dan realisasi Anggaran sebesar 97,96%.
4. Melakukan 1 (satu) Perjanjian Kerjasama antara Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Setdaprov su dengan Ketua TP. PKK Provsu tentang kegiatan Kerjasama dalam rangka pelaksanaan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Desa/Kelurahan Percontohan PKDR Melalui kegiatan Kerjasama dengan TP.PKK dalam rangka Pelaksanaan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Desa/Kelurahan Percontohan Bidang KDRT yang menghasilkan 10 pemenang Desa/Kelurahan

percontohan KDRT. Dengan Capaian Kinerja 100% dan Realisasi Anggaran sebesar 87,03%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2015 dan 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2015	Tahun 2016
Meningkatnya kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan meningkatnya upaya perlindungan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi ditingkat provinsi dan kab/kota	Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	1 MoU,1 kebijakan	1 Kebijakan/draf Pergub, 1 MoU	0	1 Kebijakan/ draf Pergub1 MoU	0	100 %
	Jumlah layanan pengaduan dan perlindungan sementara atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi	60 korban	70 Korban	85 Korban	70 Korban	170%	100 %
	Jumlah kerjasama/kemitraan di bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan tingkat provinsi dan kab/kota	- Perjanjian Kerjasama dengan 4 Kab/Kota - Pembentukan 3 P2TP2A	1 Perjanjian kerjasama, 3 P2TP2A Kab/kota	- Perjanjian Kerjasama dengan 1 Kab/ Kota - Pembentukan 3 P2TP2A	1 Perjanjian kerjasama dan 4 P2TP2A Kab/ Kota	75%	125 %
	Jumlah kerjasama dengan TP.PKK dalam rangka pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi desa/kelurahan percontohan KDRT	1 Perjanjian Kerjasama dengan TP.PKK Provsu, 10 Pemenang	1 Perjanjian Kerjasama dengan TP.PKK Provsu, 10 Pemenang	1 Perjanjian Kerjasama dengan TP.PKK Provsu	1 Perjanjian Kerjasama dengan TP.PKK Provsu, 10 Pemenang	100%	100 %

- b. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis adalah:

1. Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang kesejahteraan dan perlindungan anak tingkat provinsi dan kab/kota

2. Jumlah kerjasama/kemitraan dibidang perlindungan anak di provinsi dan kab/kota dengan target kinerja yaitu :

Melalui Program / Kegiatan sebagai berikut :

❖ **Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, dengan Capaian Kinerja yaitu :**

1. Penyusunan 1 (satu) Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan melakukan 1 (satu) MoU tentang Kabupaten/Kota Layak Anak serta Pembentukan 1 (satu) Forum Anak Provinsi melalui Kegiatan Penyusunan berbagai kebijakan di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak di Provsu dengan Capaian Kinerja Penyusunan Peraturan Gubernur 100% untuk Penetapan (satu) MoU dapat tercapai dengan realisasi Anggaran sebesar 99,18%, serta Pembentukan 1 (satu) Forum Anak Kab/Kota tentang Pencapaian Kinerja dibidang Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Sumatera Utara. Melalui kegiatan Pembentukan/ Penguatan Forum Anak North Sumatera (FANS) dengan Capaian Kinerja 100% dan realisasi Anggaran sebesar 78,27%.
2. Kerjasama/kemitraan dan lintas sektor dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak, dengan Pembentukan 1 (satu) Tim Gugus tugas Perlindungan Anak dalam rangka peningkatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak sebagai upaya Perlindungan terhadap Anak. Melalui kegiatan Operasional Gugus Tugas Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dengan Capaian Kinerja 100% dan realisasi Anggaran sebesar 82,97%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2015 dan 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2015	Tahun 2016
Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak.	Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang kesejahteraan dan perlindungan anak tingkat provinsi dan kab/kota	1 (satu) Peraturan Gubernur, 2 (dua) Mou, 3 (tiga) Forum Anak	1 Pergub, 1 MoU, 1 Forum Anak	2 (dua) Peraturan Gubernur, 3 (tiga) Forum Anak	1 Pergub, 1 MoU, 1 Forum Anak	100%	100%
	Jumlah kerja sama/Kemitraan di bidang Perlindungan Anak di Provinsi dan Kab/Kota		1 Tim Gugus Tugas		1 Tim Gugus Tugas		100 %

- c. Menguatnya sistem dan mekanisme kelembagaan dan jaringan PUG & PUHA partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta ketersediaan profil gender & Anak di Provinsi Sumatera Utara.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis adalah:

1. Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang penguatan kelembagaan PUG dan PUHA
2. Jumlah penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya yg diperoleh di Provinsi Sumatera Utara (Kab/Kota) melalui evaluasi pelaksanaan PUG tingkat Provinsi dengan target kinerja melalui Program / Kegiatan sebagai berikut :

❖ **Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), dengan Capaian Kinerja yaitu :**

1. Penyusunan 1 Program Kerja Pokja PUG sebagai pedoman/arah kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan khususnya Pengarusutamaan Gender (PUG). Melalui kegiatan Penyusunan berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG dengan Capaian Kinerja 100% dan realisasi Anggaran sebesar 60,92%. Advokasi Pembentukan Sekretariat PPRG di 9 Kabupaten/Kota sebagai upaya percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagaimana Surat Edaran Bersama 4 (empat) Menteri yaitu : Menteri Bappenas No. 270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan No. SE-33/MK.02/2012, Menteri

Dalam Negeri No. 050/4379A/SJ, dan Menteri PPPA No. SE-46/MPP-PA/11/2012 Tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Melalui kegiatan Rapat koordinasi pelaksanaan PUG percepatan (PPRG) di provinsi Sumatera Utara dengan Capaian Kinerja 100 % dan realisasi Anggaran Sebesar 89.88%.

2. Penghargaan kepada 6 (enam) Kabupaten/Kota dalam rangka Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Kab/Kota, melalui kegiatan Evaluasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, dengan realisasi kinerja 170 % dan realisasi anggaran sebesar 89,82%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2015 dan 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2015	Tahun 2016
Menguatnya sistem dan mekanisme kelembagaan dan jaringan PUG & PUHA partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta ketersediaan profil gender & Anak di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang penguatan kelembagaan PUG dan PUHA	1 Program Kerja, 10 Sekretariat PPRG	1 Program Kerja, 9 Sekretariat PPRG	1 Program Kerja, 10 Sekretariat PPRG	1 Program kerja, 9 Sekretariat PPRG	100%	100%
	Jumlah penghargaan/ Anugerah Parahita Ekapraya yg diperoleh di Provinsi Sumatera Utara melalui evaluasi pelaksanaan PUG tingkat Provinsi	6 Penghargaan : 5 Kab/Kota 1 Provinsi	Penghargaan : 6 Kab/Kota	3 Penghargaan APE : 1 Provinsi 2 Kab/Kota Penghargaan Komitmen : 6 Kab/Kota	Penghargaan : 6 Kab/Kota (Tingkat provinsi), 5 Penghargaan Tingkat Pusat (Provinsi dan Kab/Kota)	150%	170 %

- d. Meningkatnya kualitas kelembagaan, kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi, pencegahan HIV/AIDS, bahaya penanggulangan NAPZA, pengembangan dan fasilitasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kegiatan promosi, fasilitasi, advokasi, workshop.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis adalah:

1. Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang dibentuk, dan Kelompok UPPKS yang mengikuti Hari Keluarga Nasional
2. Jumlah kerjasama/kemitraan dibidang kualitas kelembagaan kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi serta pencegahan HIV/AIDS dan bahaya penanggulangan NAPZA di provinsi dan kab/kota target kinerja yaitu :

Melalui Program / Kegiatan sebagai berikut :

❖ **Program Penguatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Berencana, dengan Capaian Kinerja yaitu :**

1. Pembentukan 1 (satu) Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kabupaten/Kota yang bertujuan meningkatkan pemahaman, kemampuan dalam upaya pengembangan dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan ketahanan keluarga, serta 2 kelompok UPPKS yang mengikuti pameran Hari Keluarga Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang semula di tetapkan 1 (satu) kelompok PPKS kab/kota dapat direalisasikan serta 2 (dua) UPPKS yang mengikuti Pameran dapat direalisasikan dengan realisasi Kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar 95,33%.

2. Pembentukan 3 (tiga) Kelompok Gerakan Sayang Ibu (GSI) di Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mendukung kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Balita serta menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian, serta melakukan sosialisasi pencegahan, Pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba (P4GN) serta kasus HIV/AIDS bagi remaja di 2 (dua) Kab/Kota, yang semula di tetapkan 3 Kelompok GSI Kab/Kota tidak dapat direalisasikan karena adanya mutasi dan perubahan struktur organisasi perangkat Daerah, 2 (dua) kab/kota HIV/AIDS, NAPZA dapat direalisasikan dengan Realisasi Kinerja 80 % dan realisasi Anggaran sebesar 98,03%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2015 dan 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2015	Tahun 2016
Meningkatnya kualitas kelembagaan, kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi, pencegahan HIV/AIDS, bahaya penanggulangan NAPZA, pengembangan dan fasilitasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kegiatan promosi, fasilitasi, advokasi, workshop	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang dibentuk, dan Kelompok UPPKS yang mengikuti Hari Keluarga Nasional	2 PPKS, 3 kelompok UPPKS kab/kota	1 PPKS Kab/Kota, 2 kelompok UPPKS kab/kota (1 Pameran)	2 PPKS, 2 kelompok UPPKS kab/kota	1 PPKS, 2 kelompok UPPKS kab/kota (1 Pameran)	83,33 %	100 %
	Jumlah kerjasama/kemitraan dibidang kualitas kelembagaan kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi serta pencegahan HIV/AIDS dan bahaya penanggulangan NAPZA di provinsi dan kab/kota	3 Kelompok GSI Kab/Kota, 3 kab/kota HIV/AIDS, NAPZA	3 Kelompok GSI Kab/Kota, 2 kab/kota HIV/AIDS, NAPZA	2 Kelompok GSI Kab/Kota, 2 kab/kota HIV/AIDS, NAPZA	2 kab/kota HIV/AIDS, NAPZA	65 %	80 %

Tabel Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)	
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan meningkatnya upaya perlindungan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi ditingkat provinsi dan kab/kota	1 Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	1 Kebijakan/ draf Pergubsu, 1 MoU	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	406.591.000		343.458.297	110 %	84,47 %
				- Operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Provsu	38.000.000	1 MoU	28.410.600	100 %	74,76%
				- Penyusunan/pengembangan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota	20.000.000	1 draf Pergub	19.700.000	100 %	98,50 %
		2 Jumlah layanan pengaduan dan perlindungan sementara atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi melalui P2TP2A	70 korban	- Pengembangan sarana perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia (trafiking), pornografi dan pornoaksi di tingkat Kab/Kota	162.591.000	70 Korban	110.287.997	100 %	67,83 %

		4	Jumlah kerjasama/kemitraan di bidang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan tingkat provinsi dan kab/kota	1 perjanjian kerjasama dengan Kab/Kota, 3 P2TP2A	- Kerjasama/kemitraan dengan lintas sektor, lembaga/organisasi perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan	46.000.000	1 perjanjian kerjasama dengan Kab/Kota, 4 P2TP2A	45.061.200	130%	97,96 %
		5	Jumlah kerjasama dengan TP.PKK dalam rangka pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi desa/kelurahan percontohan KDRT	1 Perjanjian kerjasama, 10 pemenang	- Kerjasama dengan TP. PKK dalam rangka pelaksanaan super visi, monitoring dan evaluasi desa/kelurahan percontohan KDRT	140.000.000	1 Perjanjian kerjasama, 10 pemenang	139.998.500	100%	99,74%
2	Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak.	1	Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang kesejahteraan dan perlindungan anak tingkat provinsi dan kab/kota	1 (satu) Peraturan Gubernur, 1(satu) MoU, 1(satu) Forum Anak	Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak	618.500.000		500.512.979	100 %	80,92 %
					- Penyusunan berbagai kebijakan di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak di Provsu	65.000.000	1(satu) Peraturan Gubernur	64.470.050	100 %	99,18 %
					- Pembentukan/ Penguatan Forum Anak North Sumatera (FANS)	493.500.000	1 Forum Anak	386.262.929	100 %	78,27%

		2 Jumlah kerjasama/kemitraan dibidang perlindungan anak di provinsi dan kab/kota	1 (satu) Tim Gugus Tugas Perlindungan Anak,	Operasional Gugus Tugas Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara	60.000.000	1 Tim Gugus Tugas Perlindungan Anak	49.780.000	100%	82,97 %
3	Menguatnya sistem dan mekanisme kelembagaan dan jaringan PUG & PUHA partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta ketersediaan profil gender & Anak di Provinsi Sumatera Utara	1 Jumlah dokumen/kebijakan daerah dibidang penguatan kelembagaan PUG dan PUHA	1 Program Kerja, 9 Sekretariat PPRG Penghargaan : 6 Kab/Kota	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	302.000.000		225.872.600		74,53 %
				- Penyusunan berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG	160.000.000	1 dokumen program kerja	97.478.000	100%	60,92 %
				- Rapat koordinasi pelaksanaan PUG percepatan (PPRG) di provinsi sumatera utara	83.000.000	9 Sekretariat PPRG	74.599.600	100%	89,88 %
		2 Jumlah penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya yg diperoleh di Provinsi Sumatera Utara melalui evaluasi pelaksanaan PUG tingkat Provinsi		- Evaluasi pembangunan pemberdayaan perempuan melalui strategi PUG Provinsi dan Kab/Kota	59.000.000	6 Penghargaan Kab/Kota dan 5 Penghargaan Pusat (Provinsi dan Kab/Kota)	52.995.000	170 %	89,82 %

4	Meningkatnya kualitas kelembagaan, kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi, pencegahan HIV/AIDS, bahaya penanggulangan NAPZA, pengembangan dan fasilitasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kegiatan promosi, fasilitasi, advokasi, workshop,	1	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang dibentuk, dan Kelompok UPPKS yang mengikuti Hari Keluarga Nasional	1 PPKS Kab/Kota, 2 kelompok UPPKS kab/kota (1 Pameran)	Program Penguatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Berencana	370.000.000		366.824.854		99,06%
					- Pengembangan cakupan dan kualitas UPPKS melalui penyelenggaraan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS	100.000.000	2 kelompok UPPKS (1 Pameran)	95.330.500	100 %	95,33 %
					- Pengembangan dan fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	70.000.000	1 PPKS kab/kota	67.562.500	100%	96,52 %
		2	Jumlah kerjasama/kemitraan dibidang kualitas kelembagaan kelangsungan hidup ibu, anak dan bayi serta pencegahan HIV/AIDS dan bahaya penanggulangan NAPZA di provinsi dan kab/kota	3 Kelompok GSI Kab/Kota, 2 kab/kota HIV/AIDS, NAPZA	- Advokasi, KIE tentang Gerakan Sayang Ibu (GSI)	419.074.000	2 Kelompok GSI Kab/Kota	367.638.000	80%	87,73 %
					- Pengembangan cakupan dan kualitas kelompok bina keluarga remaja	79.000.000	2 kab/kota HIV/AIDS, NAPZA	77.440.000	100 %	98,03 %

B. Realisasi Anggaran

No.		Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat capaian kinerja (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1		Program pelayanan Administrasi perkantoran				
	1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	-	-	-	
	1.2	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	-	-	-	
	1.3	Penyediaan alat tulis kantor	21.400.000	21.207.600	99,10 %	
	1.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000	9.645.500	96,46 %	
	1.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	3.600.000	0	0 %	
	1.6	Penyediaan makanan dan minuman	6.000.000	3.825.000	63,75 %	
	1.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	50.000.000	39.020.970	78,04 %	
2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
	2.1	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	5.000.000	3.200.000	64,00 %	
3		Program peningkatan disiplin aparatur				
		Perbaikan fisik dan mental aparatur				
4		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				
	4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	24.000.000	10.589.800	44,12 %	
5		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
		Monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja SKPD (LAKIP), LKPJ,LPPD, TAPKIN, RENJA dan Pelayanan informasi	160.000.000	146.515.000	91,57 %	
6		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				
	6.1	Sosialisasi dan advokasi berbagai perundang-undangan, kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	0	0	0	
	6.2	Rapat Koordinasi kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	0	0	0	
	6.3	Kerjasama/kemitraan dengan lintas sektor, lembaga/organisasi perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan	46.000.000	45.061.200	130 %	

	6.4	Koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.	80.000.000	80.000.000	100%	
	6.5	Operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Provsu	38.000.000	28.410.600	100 %	
	6.6	Pengembangan sarana perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia (trafiking), pornografi dan pornoaksi di tingkat Kab/Kota	162.591.000	110.287.997	100 %	
	6.7	Penyusunan/pengembangan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota	20.000.000	19.700.000	100 %	
	6.8	Kerjasama dengan TP. PKK dalam rangka pelaksanaan super visi, monitoring dan evaluasi desa/kelurahan percontohan KDRT	140.000.000	139.998.500	100%	
7		Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak				
	7.1	Sosialisasi dan Advokasi peraturan/kebijakan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Utara	50.000.000	47.954.550	100 %	
	7.2	Penyusunan berbagai kebijakan di bidang kesejahteraan dan perlindungan anak di Provsu	65.000.000	64.470.050	100 %	
	7.3	Peringatan Hari Anak Provinsi Sumatera Utara.	0	0	0	
	7.4	Pembentukan/ Penguatan Forum Anak North Sumatera (FANS)	493.500.000	386.262.929	100%	
	7.5	Jambore Anak Provinsi Sumatera Utara	155.000.000	153.180.000	100%	
	7.6	Rapat Koordinasi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	
	7.7	Operasional Gugus Tugas Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara	60.000.000	49.780.000	100%	
	7.8	Koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Utara	92.000.000	91.999.000	100 %	
	7.9	Kerjasama/kemitraan dan lintas sektor dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak Operasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara	0 500.000.000	0 488.913.514	0 100 %	
8		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penarusutamaan Hak Anak (PUHA)				
	8.1	Penguatan kapasitas dan jaringan kelembagaan PUG di tingkat provinsi dan Kab/kota, termasuk pusat studi wanita	34.000.000	30.478.000	100%	
	8.2	Penyusunan berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG	160.000.000	97.478.000	80 %	
	8.3	Rapat koordinasi pelaksanaan PUG percepatan (PPRG) di provinsi sumatera utara	83.000.000	74.599.600	100 %	

	8.4	Sosialisasi dan Advokasi peran media dalam penganggulangan pornografi, pornoaksi, trafiking, kekerasan rumah tangga dan kekerasan perempuan	0	0	0	
	8.5	Pembekalan PUG bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain	28.000.000	27.993.700	100 %	
	8.6	Evaluasi pembangunan pemberdayaan perempuan melalui strategi PUG Provinsi dan Kab/Kota	59.000.000	52.995.000	170 %	
	8.7	Fasilitasi Forum data Gender di Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	
	8.8	Koordinasi, advokasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota	93.000.000	92.874.000	100%	
	8.9	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kebijakan peraturan perundang-undnagan tentang perempuan dan anak	43.000.000	42.128.500	100%	
	8.10	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan Pengarusutamaan Hak anak (PUHA)	23.409.000	23.409.000	100%	
9		Program Penguatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Berencana				
	9.1	Peringatan hari ibu Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	
	9.2	Advokasi, KIE tentang Gerakan Sayang Ibu (GSI)	419.074.000	367.638.000	80 %	
	9.3	Pengembangan cakupan dan kualitas kelompok bina keluarga remaja	79.000.000	77.440.000	100 %	
	9.4	Pengembangan cakupan dan kualitas UPPKS melalui penyelenggaraan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS	100.000.000	95.330.500	100 %	
	9.5	Pengembangan dan fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	70.000.000	67.562.500	100%	
	9.6	Koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi keluarga sejahtera dan berencana di kab/kota	80.000.000	79.886.000	100%	
		JUMLAH	3.453.574.000	3.069.835.010		

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan tugas pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu telah dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan Visi Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu yaitu Mendorong Aparat Publik Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak Dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2016. Untuk itu perlunya kerjasama dengan berbagai instansi terkait, LSM, organisasi masyarakat, organisasi perempuan maupun media massa, disamping itu juga Capacity Building aparat Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kinerja melalui peningkatan profesionalisme dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia agar dalam setiap melihat permasalahan yang timbul dapat ditanggapi secara holistik, wajar dan benar serta meningkatkan kerjasama antar staf dan pimpinan sehingga terjalin hubungan kerja yang harmonis.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu telah berjalan sesuai dengan rencana.

Dalam pelaksanaan tugas selama Tahun Anggaran 2016 masih ditemui beberapa kendala antara lain :

1. Rendahnya kualitas hidup perempuan baik dari segi pendidikan, kesehatan dan ekonomi sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun trafiking, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih serius.
2. Kurangnya dukungan SKPD dan Kabupaten/Kota serta dunia usaha dalam mewujudkan Kab/Kota Layak Anak sebagai bentuk pemenuhan perlindungan terhadap hak-hak anak.
3. Kurangnya pengintegrasian Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD dan Kab/Kota
4. Masih terbatasnya pemahaman dan pengetahuan anggota keluarga tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak, kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumberdaya ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga

Untuk mendukung peningkatan Kinerja Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, serta perlu dilakukan usaha pemberian motivasi kepada para staf untuk meningkatkan kemauan dan kesungguhan sehingga diharapkan ke depan kinerja Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu akan lebih meningkat.

Demikian Laporan Kinerja (LK) Instansi Pemerintah Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2016 kami sampaikan semoga dapat bermanfaat.

Medan, Februari 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVSU

Hj. NURLELA, SH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621023 198602 2 001